

Sinergitas Pemerintah Desa Dan Perusahaan Tambang Emas Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Suatu Studi Di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan)

Nova Kumolontang¹

Sarah Sambiran²

Herman Nayoan³

ABSTRAK

Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Sinergitas Pemerintah Desa dan Perusahaan Tambang Emas Melalui Program *corporate social responsibility (CSR)* di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau yang lebih sering disebut *corporate social responsibility (CSR)*, bukan lagi berada dalam tataran wacana sebagaimana beberapa tahun ke belakang, atau bentuk kegiatan amal dan respons atas kejadian luar biasa semata. CSR di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, dimana sudah menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya, maupun bagi pemangku kepentingan lain sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah dampak operasional. Terdapat dua indikator yang menunjukkan, bahwa CSR telah memiliki kedudukan penting. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas yang dilakukan antara pemerintah desa dan pihak perusahaan PT. Sumber Energi Jaya di Desa Tokin dalam program CSR, dilihat dari aspek komunikasi terlihat tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dimana pihak pemerintah desa jarang berkomunikasi dengan Pimpinan PT.SEJ dalam pengelolaan CSR dan lagi dana dan program CSR sudah tidak berjalan lancar. Namun Kurangnya transparansi penggunaan dana CSR yang diberikan dan juga oleh kurangnya transparan dari pihak perusahaan akan dana CSR menjadi masalah yang memicu lemahnya koordinasi yang terjalin selama ini.

Kata Kunci: *Sinergitas, Pemerintah Desa, Perusahaan, CSR*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Desa Tokin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan data pada tahun 2020, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Tokin adalah berjumlah 1193 jiwa dan terdapat 398 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 602 dan jumlah jiwa perempuan 591. Di sekitar desa Tokin terdapat sebuah perusahaan tambang emas yang beroperasi yakni PT Sumber Energi Jaya (SEJ) yang berada di Kecamatan Motoling Timur. Perusahaan tambang emas tersebut berlokasi di lima desa yakni Karimbow, Karimbow Talikuran, Picuan Satu, Picuan, Tokin dan Tokin Baru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pasal 8 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satunya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah mengenai teknis pelaksanaan pertambangan di daerah termasuk emas termasuk pemberian izin untuk pelaksanaan pertambangan bagi perusahaan. Selanjutnya pasal tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

PT Sumber Energi Jaya (PT SEJ), perusahaan tambang emas yang beroperasi di Minahasa Selatan

(Minsel), melingkupi area yang ditenggarai lintas kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Disisi lain adalah masyarakat beberapa desa seperti Tokin, Picuan, Karimbow yang pada akhir tahun 2000-an sempat beralih profesi dari masyarakat tani menjadi masyarakat pertambangan pasca temuan adanya kandungan emas di desa mereka tersebut. Warga desa sendiri mengantongi ijin berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas di daerah Alason dan Ranoyapo Kabupaten Minahasa (sebelum pemekaran). Pada tahun 2010, Bupati Minahasa Selatan mengeluarkan SK Nomor 87 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sumber Energi Jaya (PT SEJ). Lokasi ijin PT. SEJ ini tumpang-tindih dengan kawasan tambang rakyat. Inilah yang memicu konflik dan penolakan dari warga sekitar pertambangan. Namun seiring berjalannya waktu perusahaan tersebut berjalan dan bekerjasama dengan pemerintah desa terutama desa Tokin dengan memberikan bantuan kepada masyarakat desa.

Dari pengamatan peneliti dilapangan mengenai hubungan antara pemerintah desa Tokin dan PT. Sumber Energi Jaya (PT SEJ) sebelumnya berjalan dengan baik dimana pernah ada kerjasama dengan perusahaan tambang emas sehingga ada beberapa masyarakat Tokin yang

dipekerjakan di perusahaan tersebut, ada juga beberapa anak dari masyarakat Tokin yang dibantu untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, selain itu mereka diberi THR pada saat hari raya natal, namun tidak semua yang mendapatkan bantuan tersebut menurut mantan pala dan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

Dari pengamatan peneliti terlihat akhir-akhir ini kewajiban perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar melalui program CSR sudah tidak lagi dirasakan oleh masyarakat sekitar termasuk masyarakat desa Tokin, itulah sebabnya beberapa kali masyarakat masuk ke area tambang PT. SEJ untuk menambang secara illegal dan menjadi persoalan hukum, menurut informasi awal peneliti dimana anggaran untuk program CSR di Desa Tokin diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian Terdahulu

1. Hasan Asy'Ari, 2009. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan visi korporasi dan amanat pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat

pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat yaitu pendidikan, Infrastruktur, Perbaikan Kesehatan, Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Bisnis, Program Pertanian dan Perikanan, Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya sehingga izin penempatan tailing PT NNT, yang mesti diperpanjang pada tahun 2005, akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang, Kontroversi lain muncul terkait daerah eksplorasi Dodo di kecamatan Ropang yang melibatkan sembilan desa. Warga Labangkar mengklaim nenek moyang mereka dimakamkan di Dodo dan menuntut ganti rugi lahan dan pemakaman yang ada sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan eksplorasi di daerah tersebut. Tuntutan oleh beberapa nelayan setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil tangkapan mereka. Untuk mengatasi tuduhan ini dan memperbaiki kesalahan persepsi, PTNNT telah menyusun suatu sasaran untuk melibatkan diri lebih banyak dalam pengembangan desa

- nelayan setempat dan melakukan survei perikanan pada 2005.
2. Hari Sutra Disemadi. 2020. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimaksudkan agar perusahaan mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) dengan aspek lingkungan, serta aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Konsep CSR di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum untuk dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal.
 3. Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek wisata strategis dan sangat potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam, terdiri dari obyek wisata daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan yang terdapat di beberapa Kecamatan. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan

memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai Sinergitas antara Pemerintah Desa Tokin dan Perusahaan tambang Emas yang beroperasi area sekitar desa melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan menggunakan teori dari Najianti dalam Rahmawati et al (2014) dimana terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas dalam penelitian ini adalah sinergitas antara pemerintah desa dan perusahaan pertambangan yang ada di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Koordinasi

Adapun Informan dalam penelitian yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang Sinergitas Pemerintah desa dengan Perusahaan Tambang Emas, yakni :

1. Kepala Desa Tokin
2. Perangkat Desa
3. Pihak PT. Sumber Energi Jaya
4. Tokoh Masyarakat (Mantan Hukum Tua, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda)

Masyarakat Desa Tokin

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Yaitu : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Pembahasan

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai Sinergitas antara Pemerintah Desa Tokin dan Perusahaan tambang Emas yang beroperasi area sekitar desa melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan menggunakan teori dari Najianti dalam Rahmawati et al (2014) dimana terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas dalam penelitian ini adalah sinergitas antara pemerintah desa dan perusahaan pertambangan yang ada di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, yang kemudian dibahas berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Komunikasi

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan penerapan CSR di desa tersebut. Tidak bisa dinafikan, rasa puas ini pun sangat bergantung dari budaya setempat dimana masyarakat berada. Dalam hal ini, sinergi antara masyarakat serta perusahaan sangat dibutuhkan dalam penerapan CSR serta pemerintah desa juga turut ambil peran dalam penerapan CSR dalam lokasi desa tersebut.

Factor komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, pihak pemerintah kabupaten TNI dan Kepolisian bersama dengan pihak perusahaan merupakan hal yang mutlak dijalankan dengan baik agar tidak merugikan baik pihak perusahaan maupun masyarakat. Komunikasi dalam suatu kegiatan merupakan darah yang mengalir dan menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Sinergi antara perusahaan dan masyarakat harusnya terjalin dengan baik, agar hal-hal yang merugikan baik

antara perusahaan maupun dengan masyarakat itu sendiri.. Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan saling sinergi dan mesti ditingkatkan lagi. Dari segi bisnis perusahaan sedapat mungkin memaksimalkan potensinya untuk melakukan program CSR secara koprehensif dan berkesinambungan. Dari segi komunitas, dapat berperan proaktif dengan member input yang baik pada perusahaan dan siap berpartisipasi aktif untuk menyukseskan program CSR. Adapun dari sisi pemerintah, perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya program CSR yang digelar dikalangan dunia usaha sehingga terwujud public, private, and community partnership. Tujuan akhir yang jelas, apabila rasa kebersamaan kuat, semua dapat tumbuh dan berkembang secara sustain.

Dalam penelitian ini peneliti melihat mengenai komunikasi yang dibangun antara stakeholder yang berkaitan dengan masyarakat terutama dalam implementasi CSR di desa Tokin yang diberikan oleh perusahaan PT.SEJ. dari hasil wawancara dengan para informan peneliti melihat bahwa selama ini komunikasi yang terjali antara masyarakat dan pihak perusahaan hanya terbatas dan hanya terjadi beberapa kali saja. Menurut informan kepala desa didapati bahwa masyarakat sudah lama tidak memperoleh manfaat dari CSR itu sendiri, selain itu komunikasi yang dibangun selama ini hanya sebatas menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan juga perusahaan dan belum ada realisasi nyata di desa.

Komunikasi selanjutnya terjalin antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten dan kepolisian serta TNI, dimana pernah ada sosialisasi yang

dibuat oleh pemerintah kabupaten bersama kepolisian dan TNI dengan masyarakat bersama perusahaan SEJ. Dan beberapa kesepakatan terjadi namun tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kurangnya transparansi pengelolaan anggaran oleh pihak terkait menjadi sebuah permasalahan, karena informan dari pihak perusahaan mengatakan telah ada bantuan dana yang diberikan kepada pemerintah desa baik kepala desa lama dan perangkatnya dan juga pihak terkaitlainnya, namun kenyataannya masyarakat masih mengeluh akan kesejahteraan yang mereka dapat dari program CSR tersebut.

Implementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hasilnya, teori ekonomi politik cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam suatu dunia pluralistik (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak berwenang). Untuk itu pelaporan CSR, begitu dalam menginisiasi stakeholder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini berupaya perencanaan program CSR, serta dana yang digunakan untuk mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk, yang seterusnya hasil inisiatif dan aktivitas tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Peranan desa juga sangat menonjol dalam kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Peran desa terkait erat dengan peran sosial dan politiknya. Sebagai institusi, desa menjadi penghubung antara negara dan individu dalam hubungannya dengan penguasaan tanah, pajak, kerja bakti, penegakkan hukum dan ketertiban umum, serta penyediaan pelayanan pendidikan.

Kurangnya transparansi dana yang diberikan oleh perusahaan bukan sematamata karena kesalahan perusahaan. Pemerintah desa juga harus berusaha untuk memberikan transparansi dana kepada masyarakat. Dalam hal ini membuktikan bahwa partisipasi antara pihak perusahaan dan pemerintah desa pada realisasi CSR sangat rendah. Salah satu alasan rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah desa tersebut dikarenakan program didesain oleh perusahaan dan kurang melibatkan pemerintah. Pada tahap realisasi, program melibatkan masyarakat dan pemerintah dengan intensitas yang berbeda sedangkan pada tahap evaluasi dan pelaporan terlihat bahwa tahapan itu tidak melibatkan mereka. Akibatnya adalah koordinasi dalam merealisasikan program antara perusahaan dan pemerintah berjalan tidak baik, yang menyebabkan kegiatan CSR kurang terungkap.

2. Koordinasi

Isu lingkungan di Indonesia, sedang hangat dibicarakan masyarakat saat ini, Kita menyadari bahwa kondisi sosial masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, salah satu faktor adalah akibat perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi. Khususnya pada

dampak yang disebabkan kegiatan dari perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, suatu entitas tidak lepas dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan suatu respons yang positif dari masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan kesuksesan usaha suatu entitas. Respons tersebut diperoleh melalui apa yang dilakukan perusahaan kepada para stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar (kamil dan Herusetya, 2012:2).

Pemerintah desa seharusnya merangkul perusahaan untuk mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak terkesan berjalan sendiri sendiri. Membangun sekolah, jalan dan tempat ibadah adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan. Perusahaan bertanggungjawab membayar pajak untuk antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Walaupun pelaksanaan CSR merupakan kewajiban perusahaan, bukan berarti semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Dalam penelitian ini koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak PT. SEJ sangat kurang, mengingat kepala desa yang sekarang belum lama memimpin. Selain itu berdasarkan informan dari pihak SEJ, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak efektif menyebabkan CSR tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini juga peneliti melihat bahwa pihak perusahaan tidak memiliki perencanaan yang jelas

terhadap implementasi CSR karena banyak program CSR yang belum dikomunikasikan dengan pimpinan atau internal perusahaan sendiri, dalam artian bahwa pihak perusahaan tidak memiliki *master plan* CSR untuk dilakukan di wilayah Kecamatan Motoling Timur atau area sekitar tambang yang mereka bangun.

Seharusnya dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak dihadapkan lagi pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus merefleksikan kondisi sosial dan lingkungannya. perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata mata pada kesehatan financial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

Sudah sejatinya bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan tersebut contohnya dapat dilakukan diberbagai bidang baik dari fasilitas ataupun berupa kegiatan, Pemberdayaan bagi masyarakat dan masih banyak lagi aspek atau bidang yang sekiranya dapat dijadikan sasaran untuk melakukan kegiatan CSR tersebut. Hal ini dilakukan demi memenuhi tanggung jawab sosial yang telah diamanatkan bagi perusahaan-perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam program CSR, merupakan satu langkah yang sesuai dengan public relations, fungsi dari public relations menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan bahkan terpisah dari tahapan pekerjaan yang lain. Oleh Karena itu, public relations tersebut menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari kegiatan lainnya.

Interaksi antar anggota dan kelompok masyarakat menghasilkan berbagai bentuk kelembagaan yang berkembang sesuai dengan fungsi dan kepentingan masing-masing kelembagaan. Pola yang muncul di desa-desa sekitar wilayah operasi PT. SEJ relatif sama dimana anggota masyarakat pada umumnya berorientasi pada banyak kelembagaan tergantung konteks aktifitas dari kelembagaan tersebut. Misalnya dalam hal kegiatan perekonomian, anggota masyarakat merupakan bagian dari kelembagaan pertanian, sedangkan dalam hal kegiatan kerohanian maka anggota masyarakat merupakan bagian dari kelembagaan gereja. Pada umumnya, kelembagaan yang berkembang di desa-desa sekitar wilayah operasi PT. SEJ terdiri dari kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan ekonomi masyarakat, kelembagaan kerohanian masyarakat, kelompok pemuda dan kelompok wanita. Stakeholder sendiri diartikan sebagai orang, kelompok atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh atau memberikan pengaruh dari/kepada proses kehidupan bermasyarakat di desa-desa sekitar wilayah PT. SEJ. Aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan desa memiliki power dan interest yang berbeda-beda. Adapun paparan secara singkat

mengenai posisi dan perbedaan power dan interest masing-masing actor

Penutup

Kesimpulan

1. Sinergitas yang dilakukan antara pemerintah desa dan pihak perusahaan PT. Sumber Energi Jaya di Desa Tokin dalam program CSR, dilihat dari aspek komunikasi terlihat tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dimana pihak pemerintah desa jarang berkomunikasi dengan Pimpinan PT.SEJ dalam pengelolaan CSR dan lagi dana dan program CSR sudah tidak berjalan lancar. Komunikasi yang dibangun oleh pihak pemerintah desa juga terkait dengan pemerintah Kabupaten dan Kepolisian serta TNI akan terjalin ketika ada masalah seperti demonstrasi maupun kegiatan protes masyarakat baru diadakan komunikasi dan mediasi oleh pemerintah dan kepolisian.
2. Sinergitas antara antara pemerintah desa dan pihak perusahaan PT. Sumber Energi Jaya di Desa Tokin dalam program CSR, belum tercermin dalam bentuk koordinasi yang baik antara satu sama lain. Kurangnya transparansi penggunaan dana CSR yang diberikan dan juga oleh kurangnya transparan dari pihak perusahaan akan dana CSR menjadi masalah yang memicu lemahnya koordinasi yang terjalin selama ini.

Saran

1. Sebaiknya komunikasi yang dibangun untuk penggunaan dana CSR harus intens antara pihak pemerintah desa, masyarakat dan juga pihak perusahaan, keterbukaan akan masalah penting dikomunikasikan dengan baik dan

cara yang benar. Berkaitan dengan program yang diterapkan oleh pihak perusahaan, sebaiknya dalam penerapan program tersebut waktu yang diberikan harus sesuai yang dijanjikan. Dalam hal ini, program program CSR seringa terbengkalai pada masalah waktu yang tidak tentu dan Sebaiknya pihak perusahaan bukan hanya dalam memprogramkan pada kegiatan-kegiatan saja, akan tetapi dengan peningkatan fasilitas desa yang memadai serta kesejahteraan masyarakat.

2. Sosialisasi tentang program CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sebaiknya ditingkatkan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam merumuskan program-program agar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Agar koordinasi sering terjadi antara pemerintah desa dan perusahaan PT.SEJ. apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan CSR serta laporan, maka pemerintah daerah dan pihak kepolisian harus memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum maupun perusahaan yang menyelewengkan anggaran CSR tersebut.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zaenal. (2010). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990
- Elvinaro dan Dindin Machfudz. 2011. Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2
- Hasan Asy'Ari, 2009. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont. <http://eprints.undip.ac.id>.
- Hari Sutra Disemadi. 2020. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 4 No. 1
- Hindama Afada, 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Bank Pada PT.Bank Riau Kepri,
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Garniwa. 2007. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Kamil dan Antonious Herusetya, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility, Media Riset Akuntansi 2, no.1 (2012)
- Rahmawati, Triana dkk. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4
- Kartohadikusumo. 2008. Desa. Jakarta: Balai Pustaka
- Miner J, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>,
- Miles, M. B. and A. Huberman M. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Nova, F. 2012. Republic Relation, Jakarta : media bangsa
- Poerwanto, 2010. Corporate Social Responsibility Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi, Yogyakarta : pustaka pelajar
- Saleng, A. 2004,. Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta
- Silalahi. U. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama
- Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. *GOVERNANCE*, 1(1).

Triana R dkk. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4

Wasistiono, S. Tahir I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia*

Sumber Lainnya:

- Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kewajiban CSR bagi PT
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah